

## PENDAHULUAN

Pasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, muncul berbagai pemberontakan yang menentang Pemerintah RI (Republik Indonesia) yang sah. Salah satu pemberontakan tersebut yaitu pemberontakan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) di Jawa Barat yang dipimpin oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo<sup>1</sup>, dengan pasukannya yang diberi nama Tentara Islam Indonesia<sup>2</sup>.

Pada tanggal 10-11 Februari 1948 di Desa Pangwedusan; Cisayong; Tasikmalaya, Kartosuwiryo beserta kawan seperjuangannya seperti Raden Oni dan Kamran mengadakan suatu konferensi yang berhasil membentuk TII. Organisasi militer TII tersusun dalam bentuk satuan tingkat divisi, resimen, batalyon sampai pada satuan tingkat regu. Namun dalam setiap taktik dan gerakannya, TII tidak pernah bergerak dalam satuan yang besar. Kegiatan mereka paling besar hanya sampai pada satuan tingkat batalyon.<sup>3</sup>

Rahasia TII dalam melakukan perang gerilya yang sanggup bertahan lama hingga tahun 1962 itu tentu tidak terlepas dari adanya suatu sistem militer yang baik dalam tubuh TII. Sistem<sup>4</sup> militer<sup>5</sup> merupakan tata cara suatu negara untuk dapat mengatur sekumpulan orang-orang yang mempunyai ciri berbeda dari orang-orang sipil, yang terorganisir dan dipersenjatai, yang berperan di bidang pertahanan dan keamanan. TII dijadikan sebagai tulang punggung utama NII. NII sebagai sebuah negara tentunya telah menciptakan sebuah sistem untuk merekrut, melatih dan mempergunakan militernya itu. Dengan adanya sebuah sistem militer yang terorganisasi dengan baik ini maka pada akhirnya TII dengan kegigihan dan keuletan yang dimilikinya mampu menghadapi setiap usaha penumpasan yang dilakukan oleh TNI. Oleh sebab itu penting sekali untuk mengetahui bagaimana rahasia NII ciptaan Kartosuwiryo dalam membangun kekuatan TII hingga mampu mempertahankan eksistensi NII di wilayah Jawa Barat. TII dijadikan sebagai pasukan tempur NII untuk melakukan aksi-

---

<sup>1</sup> Penulisan Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo selanjutnya ditulis Kartosuwiryo. Penulis menyimpulkan bahwa kedudukan Kartosuwiryo adalah sebagai seorang pemberontak. Penulis melihat bahwa pada masa Kolonial Belanda kedudukan Kartosuwiryo adalah sebagai teman seiring dari pejuang-pejuang kemerdekaan RI, namun dalam masa mempertahankan kemerdekaan RI, ketika pemerintah RI lebih memilih untuk menempuh jalan perundingan diplomasi dengan Belanda—dari Linggarjati sampai Renville, Kartosuwiryo selalu berada pada posisi yang tidak setuju dengan hasil perundingan-perundingan tersebut. Sikap perlawanan terhadap pemerintah RI itu yang kemudian membawanya untuk menentang pemerintah RI, yaitu dengan memproklamasikan berdirinya NII (Negara Islam Indonesia) pada tanggal 7 Agustus 1949 yang berpusat di Jawa Barat. Sikap dan aksi tindakan yang telah dilakukan oleh Kartosuwiryo ini kemudian oleh pemerintah RI disebut dengan sebuah aksi pemberontakan. Kartosuwiryo yang merasa kecewa dengan berbagai kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah RI pada akhirnya memilih jalan menjadi seorang pemberontak. Lihat Hersri Setiawan & Joebar Ayoeb. (1982). SM. Kartosuwiryo, Orang Seiring Bertukar Jalan, *Prisma*, No. 5 Tahun XI, hlm. 96. Lihat juga Ruslan, dkk., *Mengapa Mereka Memberontak? Dedenglot Negara Islam Indonesia*. Yogyakarta: Bio Pustaka, 2008, hlm vii.

<sup>2</sup> Penulisan Tentara Islam Indonesia selanjutnya ditulis TII.

<sup>3</sup> Dinas Sejarah Tentara Nasional Angkatan Darat, *Penumpasan Pemberontakan DI/TII S. M. Kartosuwiryo di Jawa Barat*. Bandung: Dinas Sejarah Tentara Nasional Angkatan Darat, 1985, hlm. 113. Selanjutnya disingkat Disjarah TNI AD.

<sup>4</sup> Sistem mempunyai pengertian metode atau tata cara dan management atau pengurusan. Sukarna, *Sistem Politik Indonesia Jilid I*. Bandung: Mandar Maju, 1990, hlm. 7.

<sup>5</sup> Militer adalah satu kelompok orang-orang yang diorganisir dengan disiplin dan dipersenjatai, yang diperbedakan dari orang-orang sipil, yang mempunyai tugas pokok melakukan pertempuran dan memenangkan peperangan sebagai tanggungjawabnya guna mempertahankan dan memelihara keamanan dan keselamatan umum serta eksistensi negara. Yahya A. Muhaimin, *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005, hlm. 1-2.

aksi pemberontakan terhadap pemerintah RI. Penelitian ini mengkaji mengenai sistem militer dalam TII di Jawa Barat pada masa Kartosuwiryo antara kurun waktu 1948 sampai dengan tahun 1962.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah Menurut Nugroho Notosusanto, penelitian sejarah mempunyai empat tahap, yaitu: (1) heuristik, (2) kritik sumber (verifikasi), (3) interpretasi, dan (4) penyajian (historiografi).<sup>6</sup>

## PEMBAHASAN

Kartosuwiryo lahir pada hari selasa kliwon tanggal 7 Februari 1905 di Cepu, Jawa Tengah.<sup>7</sup> Kartosuwiryo merupakan sosok sentral dibalik pemberontakan DI/TII di Jawa Barat. Ia telah sejak lama menginginkan terbentuknya suatu negara Islam yang dinamakan Darul Islam<sup>8</sup>. Upaya Kartosuwiryo dalam merealisasikan gambaran tentang negara Islam itu, dapatlah dikatakan mulai berlangsung setelah ditandatanganinya perjanjian Renville. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Pemerintah RI dan Belanda pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal USS Renville.<sup>9</sup>

Penandatanganan perjanjian Renville telah memecah belah kekuatan RI. Dari hasil perjanjian itu wilayah RI di pulau Jawa hanya meliputi sebagian wilayah Jawa Tengah dan Banten. Hal ini membawa akibat anggota tentara harus ditarik dari wilayah pendudukan Belanda dan harus pindah ke wilayah RI yang sempit. Di daerah Jawa Barat, tentara yang telah menempati daerah yang strategis untuk melakukan gerilya terpaksa harus segera melakukan hijrah<sup>10</sup> ke daerah RI. Sebagian besar pasukan Divisi Siliwangi dipindahkan dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Pada waktu pasukan Divisi Siliwangi melaksanakan hijrah ke daerah Jawa Tengah, tidak semua kesatuan tentara ikut serta melakukan hijrah. Mereka yang tidak ikut hijrah terus melakukan perang gerilya di daerah Jawa Barat. Kesatuan tentara yang tidak ikut hijrah diantaranya ialah pasukan Sabilillah dan Hizbullah<sup>11</sup> yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Dengan melihat situasi dan kondisi seperti tersebut di atas maka dengan segera Kartosuwiryo memanfaatkan keadaan untuk kemudian membentuk TII pada tanggal 10-11 Februari 1948. TII terbentuk dari gabungan pasukan Hizbullah dan Sabilillah serta semua organisasi Islam yang berada di Jawa Barat.

Secara garis besar susunan organisasi militer TII tersusun dari satuan tingkat regu sampai pada satuan tingkat divisi.<sup>12</sup> Pimpinan tertinggi dipegang oleh Kartosuwiryo, yakni sebagai seorang

---

<sup>6</sup>Nugroho Notosusanto, *Norma-norma Dasar Penelitian Penulisan Sejarah*, Jakarta: Departemen pertahanan dan Keamanan, 1971, hlm. 35.

<sup>7</sup> Pinardi, *Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo*. Jakarta: Aryaguna, 1964, hlm 20.

<sup>8</sup> Darul Islam berasal dari kata "Daar al-Islam" yang berarti wilayah atau negara yang didiami dan diperintah oleh orang-orang Islam serta didalamnya berlaku hukum-hukum Islam. Hassan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia Edisi Khusus*. Jakarta: P. T. Ikhtiar Baru, 1992, hlm. 754.

<sup>9</sup> Ida Anak Agung Gde Agung, *Renville*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991, hlm. 71.

<sup>10</sup> Hijrah artinya pindah. Hijrah adalah istilah yang digunakan oleh Jenderal Sudirman untuk menyebut penarikan pasukan Divisi Siliwangi dari Jawa Barat ke Jawa Tengah sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian Renville, dengan harapan bahwa suatu waktu pasukan Divisi Siliwangi akan kembali ke daerah asalnya, yaitu Jawa Barat. Holk Harald Dengel, *Darul Islam dan Kartosuwirjo: Langkah Perwujudan Angan-angan yang Gagal*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995, hlm. 63-64.

<sup>11</sup> Hizbullah atau 'Tentara Allah' didirikan pada tanggal 8 Desember 1944 atas izin dari Jepang. Sedangkan Sabilillah atau 'Jalan Allah' didirikan pada bulan November 1945. Kedua pasukan ini merupakan laskar Islam dari partai Masyumi. Corneles van Dijk, *Darul Islam: Sebuah Pemberontakan*. Jakarta: Grafiti Pers, 1983, hlm. 63-66.

<sup>12</sup> S. M. Kartosuwiryo, "Pedoman Dharma Bakti Jilid I, Maklumat Komandemen Tertinggi Nomor 10, tanggal 21 Oktober tahun 1952, lampiran 1B", dalam Al-Chaidar, *Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S. M. Kartosoewirjo: Fakta dan Data Sejarah Darul Islam*. Jakarta: Darul Falah, 1999, hlm. 616.

Panglima Tertinggi TII. Pada satuan tingkat divisi, TII dipimpin oleh seorang Panglima Divisi yang berasal dari golongan perwira tinggi dengan pangkat letnan kolonel tingkat I sampai dengan kolonel tingkat I.<sup>13</sup> Dibawah satuan tingkat divisi, terdapat satuan tentara yang dinamakan resimen, yang dipimpin oleh seorang Komandan Resimen dengan pangkat mayor tingkat II sampai dengan letnan kolonel tingkat II. Dibawah satuan tingkat resimen terdapat satuan tingkat batalyon yang dipimpin oleh seorang Komandan Batalyon dengan pangkat kapten tingkat III sampai dengan mayor tingkat III. Selanjutnya pada satuan tingkat batalyon terdapat satuan tentara yang dinamakan kompi yang dipimpin oleh seorang Komandan Kompi. Komandan Kompi ini berpangkat letnan II tingkat II sampai dengan letnan I tingkat I.<sup>14</sup> Pada satuan tingkat kompi terdapat satuan tingkat peleton yang dipimpin oleh seorang Komandan Peleton dengan pangkat sersan mayor tingkat III sampai dengan letnan II tingkat III. Dibawah satuan tingkat peleton masih terdapat satuan tentara yang bernama regu, dimana tiap satuan tingkat regu ini dipimpin oleh seorang Komandan Regu dengan pangkat kopral sampai dengan sersan I.

Untuk dapat memelihara jiwa ketenteraan NII maka telah diatur supaya TII tidak terlalu lama tinggal di suatu kampung atau desa. Durasi menetap TII di satu tempat bergantung pada potensi ancaman. Di daerah yang tidak aman mereka hanya tinggal dua malam, tetapi apabila tempat tersebut dirasa aman mereka bertahan hingga satu tahun lamanya.<sup>15</sup> Hal ini dilakukan untuk tetap menjaga semangat juang TII. TII juga tidak boleh terlalu lama tinggal di gunung-gunung atau di hutan-hutan. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar TII tetap cekatan dalam melakukan gerakannya. Dengan demikian itu TII dapat ditempatkan di kampung atau desa dan dapat pula ditempatkan di hutan-hutan.

Gerakan cepat dapat dilakukan oleh TII dalam jumlah besar maupun kecil dan harus diusahakan dengan serba cepat untuk dapat meghindar dari bahaya. Hal ini dilakukan karena alat-alat perhubungan TII seperti alat-alat transportasi belum memadai. Dengan demikian perlu adanya gerakan pasukan yang dilakukan dengan gerakan cepat sehingga pasukan yang jumlahnya besar maupun kecil dapat mengalahkan musuh yang kekuatannya jauh lebih besar.

Pada awal terbentuknya, kekuatan utama militer TII terdiri dari Pasukan Hizbullah dan Sabilillah serta organisasi-organisasi Islam di daerah Jawa Barat yang berada dalam pengaruh Kartosuwiryo. Namun komposisi tersebut masih dirasa kurang oleh NII. Hal ini mendorong NII untuk berusaha mengembangkan dan mencari tambahan kekuatan tempur TII, yakni dengan jalan melakukan kerjasama dengan Belanda. Bantuan yang secara khusus memberikan tambahan kekuatan kepada TII ini diantaranya yaitu bekas anggota KNIL, Polisi Belanda dan Polisi Perkebunan, terutama mereka yang pernah ikut dalam gerakan yang menamakan dirinya APRA (Angkatan Perang Ratu Andil) di bawah pimpinan Westerling. Dengan modal kekuatan riil seperti di atas, maka NII kemudian berusaha menambah kekuatan tempur TII dengan jalan menarik pemuda-pemuda desa di daerah-daerah yang dikuasai dengan berbagai akal dan muslihat maupun dengan cara penculikan atau paksaan. Pihak NII menggunakan berbagai propaganda yang didalamnya mengandung unsur-unsur agama dan mistis untuk dapat menarik simpati rakyat agar mau bergabung menjadi anggota TII.

Secara umum senjata-senjata TII tersebut menurut sumbernya dapat dibagi menjadi tiga yaitu.<sup>16</sup>

1. Senjata-senjata buatan Jepang. Senjata tersebut berasal dari bekas barisan-barisan perjuangan ataupun Tentara Jepang yang melarikan diri dan masuk menjadi anggota TII.
2. Senjata-senjata bekas milik Tentara Belanda.

---

<sup>13</sup> S. M. Kartosuwiryo, "Pedoman Dharma Bakti Jilid I, Maklumat Komandemen Tertinggi Nomor 9, tanggal 17 Oktober tahun 1952, lampiran 1", *Ibid.*, hlm. 587.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Nugroho Dewanto, *Kartosowiryo: Mimpi Negara Islam*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2011, hal. 58.

<sup>16</sup> Pinardi, *op.cit.*, hlm. 98-99.

3. Senjata-senjata buatan sendiri yang masih sangat sederhana.

Untuk menjamin berlakunya hukum perang, seluruh Indonesia oleh Kartosuwiryo dibagi menjadi tujuh Daerah Perang atau Sapta Palagan.<sup>17</sup> Tujuh Daerah Perang itu meliputi daerah sebagai berikut.

1. Daerah Perang Pertama

Daerahnya meliputi seluruh wilayah Indonesia dengan nama Komando Perang Seluruh Indonesia (KPSI) yang dipimpin langsung oleh Panglima Tertinggi APNII.

2. Daerah Perang Kedua

Daerahnya meliputi beberapa wilayah dalam NII dengan nama Komando Perang wilayah Besar (KPWB). Untuk seluruh wilayah Indonesia ditetapkan tiga KPWB dan masing-masing KPWB dipimpin oleh seorang Panglima Perang KPWB. Tiga KPWB itu adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. KPWB I, terdiri atas Pulau Jawa dan Madura yang dipimpin oleh Agus Abdullah.
- b. KPWB II, terdiri atas seluruh wilayah Indonesia Timur (Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Irian Barat, dan Kalimantan) yang dipimpin oleh Kahar Muzakkar.
- c. KPWB III, terdiri atas seluruh Sumatera dan kepulauan sekitarnya yang dipimpin oleh Daud Beureueh.

3. Daerah Perang Ketiga

Daerahnya hanya meliputi satu wilayah NII dengan nama Komando Perang Wilayah (KPW). Setiap KPW dipimpin oleh seorang Panglima Perang KPW, yang diangkat oleh Imam NII. Dengan demikian beberapa KPW merupakan satu KPWB. Seluruh Indonesia terdapat tujuh KPW yakni:<sup>19</sup>

- a. KPW I, terdiri dari daerah Karesidenan Jakarta, Purwakarta, Cirebon dan Priangan Timur.
- b. KPW II, terdiri dari Jawa Tengah. Namun wilayah ini dihapus karena gerakan Darul Islam yang dipimpin oleh Amir Fatah telah lama gagal.
- c. KPW III, direncanakan di daerah Jawa Timur dibawah pimpinan Masduki.
- d. KPW IV, terdiri dari Sulawesi Selatan dan daerah sekitarnya dibawah pimpinan Kahar Muzakkar.
- e. KPW V, terdiri dari wilayah Pulau Sumatera dibawah pimpinan Daud Beureueh.
- f. KPW VI, direncanakan di daerah Kalimantan dibawah pimpinan Ibnu Hajar, tetapi gagal.
- g. KPW VII, terdiri dari Karesidenan Bogor, Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang dan Karesidenan Banten dibawah pimpinan Ateng Djaelani Setiawan.

4. Daerah Perang Keempat

Daerahnya meliputi satu wilayah Karesidenan NII dengan nama Komando Perang Setempat atau KOMPAS. Setiap KOMPAS dipimpin oleh seorang Komandan Pertempuran KOMPAS, yang diangkat oleh Panglima Perang KPW atas nama Imam NII.

5. Daerah Perang Kelima

Daerahnya meliputi satu wilayah Kabupaten NII dengan nama Sub Komando Perang Setempat atau Sub-KOMPAS. Setiap Sub-KOMPAS dipimpin oleh Komandan Pertempuran Sub-KOMPAS, diangkat oleh Panglima Perang KPW, atas nama Imam NII.

6. Daerah Perang Keenam

Daerahnya meliputi satu wilayah Kecamatan NII atau lebih dengan nama Sektor. Setiap Sektor dipimpin oleh seorang Komandan Pertempuran Sektor, yang diangkat oleh Komandan Pertempuran KOMPAS yang bersangkutan atas nama Imam NII.

7. Daerah Perang Ketujuh

---

<sup>17</sup> S. M. Kartosuwiryo, "Pedoman Dharma Bakti jilid I, Maklumat Komandemen Tertinggi Nomor 11, tanggal 7 Agustus tahun 1959", dalam Al-Chaidar, *op.cit.*, hlm. 624.

<sup>18</sup> Holk Harald Dengel, *op.cit.*, hlm. 135.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 135-136.

Daerahnya meliputi satu desa atau lebih dengan nama Sub-Sektor, dipimpin oleh seorang Komandan Pertempuran Sub-Sektor.<sup>20</sup> Setiap Komandan Pertempuran Sub-Sektor diangkat oleh Komandan Pertempuran Sub-KOMPAS atas nama Imam NII.

Menurut struktur komando ini, hampir semua perjuangan militer dan komandonya dipertanggungjawabkan kepada Komandan Pertempuran KOMPAS. Komandan Pertempuran KOMPAS mengatur langsung setiap pasukan yang ada di bawah pimpinannya dan juga sekaligus sebagai perantara terakhir untuk menyalurkan dan melanjutkan segala instruksi atasannya kepada bawahannya. Sebagai komandan lapangan, Komandan Pertempuran KOMPAS juga harus menentukan siasat dan strategi militer.

Praktek Pagar Betis yang diterapkan dalam usaha pengisolasian gerakan DI/TII bertujuan untuk mendesak TII ke suatu daerah tertentu. Setelah kesatuan TII terdesak ke suatu daerah tertentu, maka daerah tersebut kemudian dilingkari dengan garis pertahanan Pagar Betis. Setiap 5 meter terdapat satu saung pos rakyat yang terdiri dari 5 orang yang tidak bersenjata. Pada setiap 5 sampai 10 saung pos rakyat atau setiap 20-40 meter, terdapat satu pos militer yang berkekuatan 3 pucuk senjata. Antara satu saung dengan saung yang lainnya, dipasang rintangan berupa tali yang digantungi dengan kaleng-kaleng kosong yang diisi dengan sejumlah bebatuan dan dipasang setinggi betis. Dengan ini akan timbul bunyi manakala tali itu tersentuh. Selain itu dipasang lagi satu tali setinggi pinggang yang dimaksudkan sebagai alarm yang ditarik pada saat terdapat bahaya menurut kode-kode tarikan yang sebelumnya telah ditetapkan.<sup>21</sup>

Percepatan pemulihan keamanan di Jawa Barat telah digariskan oleh pemerintah bahwa daerah Jawa Barat harus sudah tercapai seluruhnya pada akhir tahun 1962. Untuk melaksanakan hal tersebut maka Kodam VI Siliwangi mengadakan suatu operasi penentuan yang terakhir. Operasi tersebut diberi nama Operasi Brata Yudha yang mulai dilaksanakan sejak bulan April 1962. Dalam pelaksanaannya, Kodam VI Siliwangi dibantu oleh Kodam VII Diponegoro dari Jawa Tengah dan Kodam VIII Brawijaya dari Jawa Timur. Pelaksanaan operasi Brata Yudha ini dibagi dalam beberapa daerah pertempuran yaitu.<sup>22</sup>

- a. Kuru Setra I, DO C5, meliputi komplek Gunung Galunggung.
- b. Kuru Setra II, DO C8 dan 9, meliputi daerah Gunung Guntur.
- c. Kuru Setra III, DO C6, meliputi daerah Rangas dan Maroco.
- d. Kuru Setra IV, DO C12, meliputi komplek Cimareme.

Pada awal Mei tahun 1962, pemimpin TII yang telah menyerah yakni Toha Mahfud, menyerukan kepada Kartosuwiryo, Agus Abdullah dan Adah Djaelani Tirtapradja untuk menghentikan perlawanan. Akhirnya pada akhir bulan itu juga, karena keadaan yang sudah tak dapat diperbaiki lagi tingkat keparahannya, Adah Djaelani Tirtapradja meletakkan senjata. Dengan menyerahnya Adah Djaelani Tirtapradja, tokoh penggerak utama TII tinggallah Agus Abdullah dan Kartosuwiryo beserta pengawalnya yang bernama Aceng Kurnia.

Gerakan operasi selanjutnya ditujukan untuk mencari tempat persembunyian pemimpin pemberontakan DI/TII yaitu Kartosuwiryo. Mulai tanggal 3 Juni 1962, kesatuan-kesatuan Batalyon 328 Kujang II Siliwangi dikerahkan di daerah-daerah operasi untuk mencari jejak TII. Dalam melaksanakan tugas operasi ini, kesatuan militer masih tetap mengikutsertakan seluruh rakyat untuk melaksanakan tugas Pagar Betis. Akhirnya Peleton II dibawah pimpinan Letnan Dua Suhanda dari kompi C Batalyon 328 Kujang II, telah berhasil melakukan pengepungan di daerah Gunung Geber, Majalaya pada tanggal 4 Juni 1962. Dalam pengepungan tersebut ditemukan gubuk-gubuk persembunyian TII yang didalamnya terdapat Kartosuwiryo, beserta putra dan juga pengawalnya yakni Mohammad Darda dan Aceng Kurnia. Di daerah Gunung Geber ini akhirnya mereka menyerah.

---

<sup>20</sup> Disjarah TNI AD, *op.cit.*, hlm. 128.

<sup>21</sup> Holk Harald Dengel, *op.cit.*, hlm. 187.

<sup>22</sup> Disjarah TNI AD, *op.cit.*, hlm. 137.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al-Chaidar. (1999). *Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S. M. Kartosoewirjo: Fakta dan Data Sejarah Darul Islam*. Jakarta: Darul Falah.
- Dengel, Holk Harald. (1995). "Darul Islam: Kartosoewirjo Kompf Um Einen Islamischen Staat Indonesien", ter. Tim Pustaka Sinar Harapan, *Darul islam dan kartosuwiryo: langkah perwujudan angan-angan yang gagal*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Dijk, Corneles van. (1983). "The Rellibion Under The Banner Of Islam" terj. Tim Grafiti Prees, *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*. Jakarta, Pustaka Utama Grafiti.
- Dinas Sejarah TNI AD. (1985). *Penumpasan Pemberontakan DI/TII S. M. Kartosoewirjo di Jawa Barat*. Bandung: Dinas Sejarah TNI AD.
- Hassan Shadily. (1992). *Ensiklopedi Indonesia Edisi Khusus*, Jakarta: P.T. Ichtiar Baru.
- Ida Anak Agung Gde Agung. (1991). *Renville*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Nugroho Dewanto. (2011). *Kartosoewirjo: Mimpi Negara Islam*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Nugroho Notosusanto. (1971). *Norma-norma Dasar Penelitian Penulisan Sejarah*. Jakarta: Departemen pertahanan dan Keamanan.
- Pinardi. (1964). *Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo*. Jakarta: Arya Guna.
- Ruslan, dkk. . (2008). *Mengapa Mereka Memberontak? Dedenglot Negara Islam Indonesia*. Yogyakarta: Bio Pustaka.
- Sukarna. (1990). *Sistem Politik Indonesia Jilid I*. Bandung: Mandar Maju.
- Yahya A. Muhaimin. (2005). *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

### Artikel/Majalah

- Hersri Setiawan dan Joebar Ayoeb. (1982)." S. M. Kartosuwiryo, Orang Seiring Bertukar Jalan". *Prisma*, No. 5, Tahun XI, hlm. 79-96.

Reviewer



Dr. Aman, M. Pd.  
NIP. 19741015 200312 1 001

Yogyakarta, 8 Juli 2014  
Pembimbing



M. Nur Rokhman, M. Pd.  
NIP. 19660822 199203 1 002